

## Analisis Ekonomi

# Penjatahan vs Pajak BBM

Oleh: Prof Bambang Setiaji

HARGA minyak dunia terus meningkat mendekati USD100 per barel. Kenaikan ini diperkirakan bersifat permanen, bukan peningkatan musiman yang segera kembali pada harga semula.

Peningkatan harga minyak dunia disebabkan perkembangan ekonomi dan industri di China dan India yang memiliki besaran signifikan karena penduduk kedua negara merupakan sepertiga atau 35% penduduk dunia. Di samping itu, konflik di Irak yang merupakan ladang minyak dan kemungkinan konflik Barat dengan Iran mengenai masalah program nuklir Iran menyebabkan demand shock yang tidak segera mengendur. Peningkatan harga minyak dunia menyebabkan penerimaan APBN meningkat juga. Namun dari sisi pengeluaran, subsidi akan terus meningkat karena bahan bakar minyak (BBM) yang kita gunakan merupakan hasil impor.

Kenaikan subsidi APBN ini disebabkan dua hal. Pertama, harga beli impor meningkat karena kenaikan harga minyak dunia. Kedua, jumlah konsumsi BBM meningkat karena pertumbuhan industri dan kendaraan bermotor. Peningkatan ekonomi di masa depan mungkin akan memperbesar laju peningkatan kebutuhan BBM untuk kendaraan. Hal ini mungkin terjadi karena keluargakeluarga yang mengalami peningkatan ekonomi mulai menggantikan kendaraan roda dua yang sangat hemat BBM menjadi kendaraan roda empat, terutama di pasar kendaraan bekas.

Dari sisi ini saja, terlihat perlunya kebijakan komprehensif terkait BBM yang perlu dirumuskan, misalnya transportasi publik yang tepat waktu, memiliki banyak frekuensi, dan nyaman. Untuk mengatasi peningkatan subsidi BBM, pemerintah berencana menaikkan harga sebagian BBM dengan memperkenalkan pengganti premium berharga Rp4.500 per liter dengan BBM yang memiliki daya bakar lebih bersih dengan harga sekitar Rp6.750 atau berbeda 50%.

Gagasan ini dapat dimengerti dan merupakan ide bagus karena kenaikan harga BBM hanya mengenai kelompok kaya dan tetap menghindarkannya dari kelompok bawah. Jika pemerintah menaikkan secara merata seluruh harga BBM, maka rakyat, terutama mahasiswa, akan mengamuk seperti tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan BBM merupakan isu politik ampuh yang bisa menggoyang kelestarian incumbent pada Pemilu 2009.

### Pasar Gelap

Sistem penjatahan ini harus menjadi sistem nasional di masa depan dan tidak hanya diterapkan di Jabodetabek yang dampak APBN-nya kurang signifikan. Kelemahan dari penjatahan adalah akan munculnya pasar gelap yang rawan korupsi. BBM dijual secara terbuka dan tidak mungkin diawasi 24 jam. Ketika mobil pribadi melakukan pembelian BBM di tempat yang bersubsidi, mungkin akan mendapat sanksi sosial. Akan tetapi, beda harga antara premium dan penggantinya yang besar, mungkin akan mendorong munculnya pemain antara. Penjual BBM eceran sekarang saja sudah banyak sekali dan hampir dapat ditemukan di mana saja.

Perbedaan harga akan mendorong pemilik mobil marginal untuk membeli dari perantara ini. Penjatahan yang mirip semacam ini terjadi pada 1960-an dan awal 1970-an, yaitu di bawah rezim kontrol devisa. Peminat devisa, untuk mengimpor bahan-bahan yang sudah ditentukan, dibatasi sehingga banyak orang yang mendapat jatah dapat menjualnya di pasar gelap. Banyak pengusaha palsu yang hanya menjual jatah. Hal ini sangat merusak kredibilitas bisnis secara umum. Pasar gelap yang berlaku umum akan menimbulkan moralitas bisnis yang buruk.

Korupsi akan membudaya karena para pengecer mungkin akan menyuap petugas. Selisih harga BBM sebesar 50% merupakan bisnis yang sangat menarik. Dalam waktu singkat akan bermunculan profesi pengecer ini sampai di kampung-kampung. Pengguna mobil bekas yang merupakan pengguna marginal akan memilih menggunakan BBM eceran yang lebih murah.

### Pajak Pengembalian Subsidi

Masalah yang dihadapi pemerintah sebenarnya adalah bagaimana mengurangi beban subsidi. Dengan harga minyak dunia meningkat di sekitar USD100 per barel, beban subsidi diperkirakan meningkat menjadi sekitar Rp90 triliun. Mengingat akibat dari penjatahan yang kurang baik

terhadap iklim bisnis, yaitu munculnya pasar gelap, maka pajak pengembalian subsidi BBM bagi pemilik mobil pribadi merupakan alternatif yang perlu dipikirkan. Implementasi pajak untuk menggantikan sistem penjatahan sebenarnya cukup sederhana.

Sebagai misal, pengurangan subsidi untuk tahap pertama di wilayah Jabodetabek ditargetkan sebesar Rp6,5 triliun, maka hal itu diperoleh dengan membagi angka itu dengan jumlah kendaraan roda empat yang menjadi target. Target tentunya merupakan kombinasi antara besaran kapasitas mesin dan tahun pembuatan. Langkah ini memenuhi asas manfaat dan asas keadilan atau progresivitas pajak. Pajak kendaraan saat ini merupakan sumber pendapatan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah tingkat dua. Karena pajak baru tersebut bertujuan untuk mengembalikan subsidi pemerintah pusat, maka pajak tersebut hendaknya ditagih bersama, tetapi memiliki peruntukan sendiri-sendiri. Peningkatan pajak sebagai pengganti BBM yang dikonsumsi secara langsung akan menyebabkan pengurangan konsumsi mobil.

Kepadatan lalu lintas diharapkan berkurang, emisi gas juga berkurang, dan ekonomi rakyat akan meningkat. Hubungan antara peningkatan pajak kendaraan bermotor dan konsumsi atau pembelian kendaraan dan emisi gas merupakan dampak langsung. Sedangkan dampak kepada ekonomi rakyat bersifat turunan. Pengurangan kepemilikan kendaraan roda empat akan menyebabkan keluarga-keluarga memiliki kelebihan kas di tangan, dapat menginvestasikan di sektor produktif. Jika harga rata-rata mobil Rp100 juta, setiap keluarga akan dapat menciptakan lapangan kerja secara langsung maupun tidak langsung dengan menginvestasikan kelebihan dana di lembaga keuangan. Bias konsumsi akan berkurang dan kualitas keseimbangan umum akan membaik, karena dana akan dibelanjakan ke sektor yang lebih produktif.

Dengan demikian, pengangguran diharapkan berkurang dan ekonomi umum akan meningkat. Berkurangnya minat memiliki kendaraan roda empat hendaknya dibarengi dengan perbaikan sistem transportasi publik. Masalah ini sudah klasik, tetapi merupakan problem riil di kota-kota besar. Dari sisi administratif, pemungutan pajak jauh lebih simpel dan lebih aman daripada mendefusi sistem penjatahan BBM menjadi sistem nasional. Pembelian atau penggunaan BBM berkualitas tetap diperluas yang berhubungan dengan peningkatan kualitas secara alami.

Pengalihan ke sistem pajak juga dapat mengurangi emisi ketika tingginya pajak kendaraan mendorong orang benar-benar beralih ke transportasi publik. (\*)

**URL Source:** <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/berita-utama/analisis-penjataha>

PROF BAMBANG SETIAJI  
Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta

---

#### **Keterangan Artikel**

Sumber: **Koran Sindo**

Tanggal: **10 Des 07**

Catatan: -

---

URL Artikel : [http://www.unisosdem.org/ekopol\\_detail.php?aid=9086&coid=2&caid=19](http://www.unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=9086&coid=2&caid=19)

Copyright © 2007 Uni Sosial Demokrat, <http://www.unisosdem.org>